

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTABANJARMASIN SESUDAH OTONOMI DAERAH

 Oleh: DODDY SETIAWAN (03620010)

Accounting

Dibuat: 2010-06-18 , dengan 7 file(s).

Keywords: Kinerja Keuangan Pemerintah, Otonomi Daerah

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Sesudah Penerapan UU Otonomi Daerah Serta Mengukur Tingkat Ketergantungan Kepada Bantuan Pemerintah Pusat.

Alat analisis yang digunakan adalah Value For Money untuk mengukur kinerjanya dengan ekonomi, efisiensi dan efektivitas sebagai tolok ukurnya. Sedangkan untuk mengkaji tingkat ketercapaian penerimaan dan pengeluaran anggaran dan rasio keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin sesudah otonomi daerah guna mengukur kinerja keuangannya adalah Analytical procedure (Rasio Kemandirian, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Aktivitas, Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD, Rasio Laba dari BUMD terhadap PAD dan Rasio Lainlain yang sah terhadap PAD).

Hasil Analisis Value For Money sesudah otonomi daerah tahun 2006/2008 hanya pada tahun 2006 tingkat ekonomi dan efisiensinya yang hasilnya lebih 100%, artinya pada tahun tersebut kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tidak ekonomis dan tidak efisien. Namun, berdasarkan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu secara keseluruhan menyatakan tingkat ekonomi setelah otonomi daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

Sedangkan analytical procedure dengan perhitungan terhadap rasio rasio laporan APBD dapat dikatakan bahwa tujuan otonomi daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri, belum sepenuhnya tercapai karena tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyarankan sebaiknya Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pihak luar dengan melakukan intensifikasi dan eketensifikasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi, serta mempertahankan tingkat ekonomi juga lebih menstabilkan tingkat efisiensi dan efektivitas.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the Banjarmasin Government City financial performance after regional autonomy implementation and knowing dependence rate to the outer institution.

The analysis tool to determine the financial performance of Banjarmasin Government City are value for money (economy, efficiency and effectiveness as measuring rod) for performance measurement and analytical procedure to APBD ratio (independence ratio, region tax value toward PAD, regional retribution, profit ratio of BUMD toward PAD, and other legal PAD ratios).

The calculation result of value for money measurement after the regional autonomy 2006-2008

period, just in 2006 period that economy and efficiency rate more than 100%. It's mean the Banjarmasin Government City financial performance is not economical and efficient. However, based on comparison with the last research, the result by economy rate after regional autonomy shows the Banjarmasin Government City financial performance is better than before.

Even though, analytical procedure with APBD ratio shows that regional autonomy purpose is to encourage the regional government to be more empower all potentials had by their region in order to build and develop their region, is have not fully accomplished because the dependence to the outer institution still high.

Based on the explanation above, researcher suggest that it's better for Banjarmasin Government City to decrease it's dependence to the outer institution by intensification and extensification to the tax levied, and retribution, maintain the economy, and increase the efficiency & effectiveness level.